

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu *human Trafficking* atau yang biasa dikenal dengan perdagangan manusia telah menjadi permasalahan panjang yang terjadi di dunia terlepas dari banyaknya upaya pencegahan yang telah dan terus dilakukan. Perdagangan manusia menurut *Section 370 of the Indian Penal Code*, didefinisikan sebagai tindakan mengangkut, menyimpan, memindahkan atau menerima seseorang tanpa persetujuannya dari satu lokasi ke lokasi lain untuk tujuan eksploitasi (Upadhyay, 2021).

Beberapa bentuk perdagangan manusia menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai objek perdagangannya. Pernikahan paksa dan palsu yang menargetkan perempuan dan anak perempuan terjadi di beberapa negara, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan perdagangan perempuan dan anak perempuan untuk dijadikan '*bride*' atau istri. Pernikahan paksa melalui perdagangan manusia ini kemudian dikenal sebagai fenomena *bride trafficking* (Irshad, 2021).

Bride trafficking merupakan bentuk kejahatan terhadap perempuan yang berkedok pernikahan dalam praktiknya. Para perempuan diperdagangkan di bawah dalih pernikahan tanpa persetujuan korban, yang tujuannya tentu bukan sekadar untuk dinikahi dan hidup bahagia seperti yang telah dijanjikan, melainkan untuk dieksploitasi. Fenomena *bride trafficking* merupakan fenomena populer yang sering terjadi di Cina, yang umumnya disebabkan karena rendahnya rasio jenis

kelamin sehingga perempuan yang dapat dinikahi berkurang jumlahnya. Cina menjadi destinasi *bride trafficking* dari negara-negara seperti Myanmar, Korea Utara, Rusia, Mongolia, dan Vietnam (Chandel, n.d). Fenomena ini juga mengancam India, dimana praktik *bride trafficking* telah memiliki sejarah panjang di India bahkan sejak tahun 1970 (Irshad, 2021).

The Ministry of Home Affairs (MHA) India memperkirakan bahwa 10% perdagangan seks di India terjadi di kawasan internasional ke negara-negara Arab, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan 90% di antaranya terjadi di kawasan domestik India, di mana perempuan dan anak perempuan diperdagangkan dengan tujuan eksploitasi seksual dan pernikahan paksa (Shelley, 2010; Singh, 2017; Chandel, n.d). Berikut adalah data jumlah perdagangan perempuan dengan tujuan untuk dinikahkan paksa yang terdaftar selama periode 2018-2022:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Perdagangan Perempuan Dengan Tujuan Pernikahan Paksa (2018-2022)

<i>Year</i>	<i>Victims Trafficked (female)</i>	<i>Purpose of Human Trafficking (forced marriage)</i>
2018	3719	220
2019	4079	227
2020	2797	187
2021	4062	182
2022	3594	195

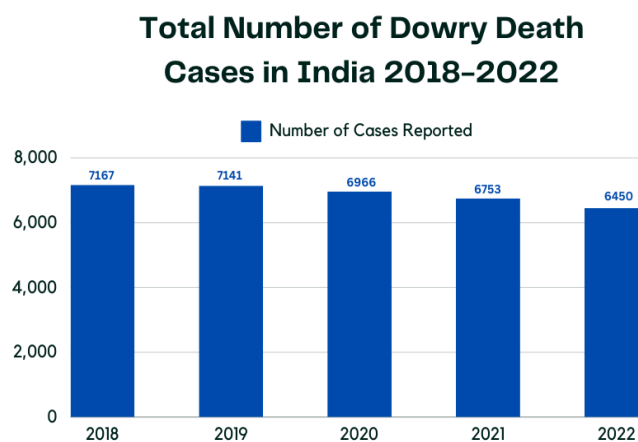
Sumber: Kompilasi peneliti dari informasi di *National Crime Records Bureau India (2018-2022)*

Maraknya fenomena perdagangan perempuan erat kaitannya dengan berbagai bentuk diskriminasi berbasis gender yang masih kerap dihadapi oleh perempuan. Masalah kultural yang ada di India perlu digaris bawahi sebagai salah

satu faktor penyebab diskriminasi serta pelanggaran terhadap hak perempuan di India. India adalah negara dengan budaya yang sangat beragam dan masih memegang teguh keunikan tradisi mereka sebagai aspek penting dari identitas India. Namun, nilai-nilai tradisi yang dipegang teguh oleh India justru merugikan sebagian kelompok masyarakat, yaitu perempuan. Beberapa tradisi di India cenderung bersifat mendiskriminasi dan membatasi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya (Darma, 2016).

Salah satu tradisi yang dimaksud adalah tradisi *Dowry*, yaitu pemberian mahar oleh pihak calon pengantin perempuan kepada pihak calon pengantin laki-laki. Tradisi *dowry* menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat serius dan sering dikenal sebagai *dowry deaths* yaitu kematian karena mahar. Sekitar 7167 kasus *dowry deaths*, terdaftar di tahun 2018 dan 6450 kasus pada tahun 2020 (NCRB, 2018-2022). Meski terdapat sedikit penurunan jumlah kasus di tiap tahunnya, tingkat praktik *dowry deaths* masih sangat tinggi. Berikut adalah jumlah kasus *dowry deaths* yang terdaftar dari tahun 2018-2022:

Gambar 1. 1 Jumlah Kasus Dowry Deaths yang Terdaftar (2018-2022)



Sumber: Kompilasi peneliti dari informasi di NCRB 2018-2022

Selain *dowry deaths*, tradisi ini juga menjadi penyebab utama praktik kekerasan berbasis gender yang dikenal sebagai *female foeticide* (aborsi/pembunuhan janin bayi yang berjenis kelamin perempuan). Keengganan untuk melahirkan anak perempuan merupakan manifestasi dari persepsi keluarga dan pola pikir masyarakat yang bias terhadap laki-laki dan menilai kelahiran anak perempuan hanyalah sebuah beban. *Female foeticide* merupakan praktik yang sering dilakukan di daerah India Utara, meliputi Negara Bagian Haryana, yang sebagian besar didominasi laki-laki (Upadhyay, 2021). Praktik *female foeticide* menyebabkan terjadinya *skewed gender ratio*, dimana jumlah anak perempuan yang dapat dinikahi berkurang pada satu daerah seperti Haryana, yang kemudian akan meningkatkan fenomena *bride trafficking* dimana laki-laki harus ‘membeli’ perempuan dari daerah lain untuk dapat dinikahkan (Saha, 2018).

Pada kasus dimana pihak perempuan tidak mampu memenuhi permintaan mahar akibat kondisi ekonomi, perempuan akan berada di posisi yang rentan. Kerentanan inilah yang dimanfaatkan para pelaku *bride trafficking* untuk mendapat keuntungan dari menjual perempuan-perempuan ini ke luar wilayahnya—seringkali ke wilayah Haryana, Punjab, dan Rajasthan—dengan diimingi pernikahan tanpa mahar (Empower People, 2024).

Keberadaan tradisi yang bias gender, maraknya pembunuhan janin perempuan, dan kondisi ekonomi keluarga yang buruk secara bersamaan menyebabkan tingginya kasus *bride trafficking* di India. Perempuan dipandang sebagai sebuah objek untuk diperjualbelikan dan sebuah investasi yang sangat baik bagi mereka yang diselimuti kemiskinan dengan harapan untuk memperbaiki

kondisi ekonomi mereka; pada studi kasus yang dilakukan oleh Niteesh Kumar Upadhyay, 70% korban perdagangan pengantin adalah mereka yang hidup di bawah tingkat kemiskinan (Upadhyay, 2021).

Bride Trafficking adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan di India hasil dari praktik sosial budaya yang mendiskriminasi perempuan di kalangan masyarakat India, khususnya daerah pedesaan yang masih memegang erat pola pikir dan keharusan-keharusan tradisional. Ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami perempuan akibat konstruksi sosial ini menggambarkan relasi kuasa gender, dimana terdapat sebuah struktur sosial yang melihat laki-laki sebagai pihak yang memiliki peran dominan, sedangkan perempuan dilihat sebagai "masyarakat kelas dua" dan memiliki peran yang subordinat. Struktur sosial ini begitu mengakar di praktik sosial budaya dan kalangan masyarakat India, sehingga praktik-praktik diskriminasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan perempuan di India. Ketidakberdayaan mereka menjadikan praktik *bride trafficking* sebagai hal yang lumrah untuk dilakukan di India, bagaimanapun ini merupakan pelanggaran besar terhadap Hak Asasi Manusia.

Meski praktik *bride trafficking* telah berlangsung sejak lama di India, hingga saat ini belum ada data dan statistik resmi dari pemerintah India mengenai jumlah korban maupun kasus *bride trafficking*, sehingga isu *bride trafficking* sulit bahkan tidak dapat ditangani di tingkat polisi atau lembaga penegak hukum lain. Hal ini disebabkan oleh eratnya keterkaitan antara institusi pernikahan dalam fenomena *bride trafficking*. India merupakan negara dengan tuntutan atau ekspektasi yang tinggi untuk pernikahan, dimana dalam budayanya pernikahan

dilihat sebagai ritual suci, privat, dan formal. Formalisasi pernikahan ini kemudian membuat fenomena *bride trafficking* di India menjadi sangat sulit untuk ditantang di bawah hukum (Saha, 2018).

Hingga saat ini fenomena *bride trafficking* di India masih belum diatur secara spesifik oleh Pemerintah India. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat India atas eksistensi *bride trafficking* sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan perdagangan manusia. Lemahnya hukum dan minimnya kebijakan terkait *bride trafficking* di India mendorong munculnya sebuah gerakan atau organisasi seperti *Non-Governmental Organization* yang berupaya mengisi *gap* yang gagal diisi pemerintah dalam menanggulangi isu *bride trafficking* di India. Satu-satunya NGO di India yang memiliki fokus utama pada isu-isu *bride trafficking* di India adalah NGO *Empower People*.

Empower People mendefinisikan *bride trafficking* sebagai masalah sosial yang sangat kompleks dan melibatkan sejumlah institusi sosial, kepercayaan dan praktik budaya, serta faktor ekonomi. Para korban *bride trafficking* mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari pelanggaran seksual, eksploitasi ekonomi, dan pengucilan sosial. Maka dari itu, sebagai sebuah NGO, *Empower People* melihat bahwa pemberdayaan perempuan dan kesetaraan partisipasi merupakan hal krusial yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan India yang pada dasarnya kerap mengalami diskriminasi dan termarjinalkan, khususnya para penyintas *bride trafficking* (Khan, 2024).

Dalam upaya memberantas *bride trafficking* di India, *Empower People* melakukan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. *Empower People* mengupayakan mekanisme yang memusatkan para penyintas melalui peningkatan kapasitas dan pemberdayaan para penyintas untuk dapat menjadi 'survivor leaders'. Mereka dilatih dan diberikan pendidikan untuk menjadi bagian dari pencipta perubahan sehingga mereka dapat melakukan kampanye-kampanye terkait kesadaran untuk membendung kejahatan perdagangan pengantin, bahkan berpartisipasi dan terlibat di pemerintah daerah untuk dapat memasukkan isu-isu perdagangan pengantin ke dalam skema pemerintah dan rencana kesejahteraan daerah (Khan, 2024).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat fakta yang menunjukkan adanya keterkaitan antara tingginya tingkat diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di India dengan fenomena *bride trafficking*. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang oleh penulis dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana masalah-masalah kultural yang mendiskriminasi perempuan di India menyebabkan fenomena *bride trafficking* serta strategi yang dilakukan oleh *Empower People* sebagai NGO lokal dalam menanggulangi persoalan *bride trafficking*.

1.2 Perumusan Masalah

Melalui pembahasan singkat di uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka timbul pertanyaan yang peneliti rumuskan menjadi: "*Bagaimana strategi Empower People dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan sebagai akar penyebab bride trafficking di India?*"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada diskriminasi terhadap perempuan di India sebagai penyebab *bride trafficking*. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana ketimpangan relasi kuasa gender dan diskriminasi perempuan di India yang menjadi penyebab fenomena *bride trafficking* di India, sekaligus menjelaskan strategi yang digunakan *Empower People* sebagai NGO lokal India dalam mengeliminasi ketidaksetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi perempuan untuk menanggulangi *bride trafficking* di India.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan akademik ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian mengenai pengaruh diskriminasi gender terhadap kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan manusia dari kacamata feminisme liberal. Secara akademis, penelitian ini menawarkan kerangka teoretis yang dapat dijadikan rujukan bagi studi lebih lanjut terkait perdagangan manusia, ketimpangan gender, serta strategi yang diambil oleh NGO. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan peran budaya patriarki dalam memicu *bride trafficking* dan pentingnya kesetaraan gender sebagai upaya pencegahan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi literatur sebagai gambaran awal dan referensi pada penelitian-penelitian terdahulu. Studi literatur yang akan digunakan peneliti sebagai tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah penelitian dari

Julia Guenther dalam “*Gender and Globalization: Power Relations at India’s Margins*” (2015), Faseeha Saif dan Dr. Ahmad Raza dalam “*Implications of Liberal Feminism for Pakistani Society*” (2019), Hafsa Bennis dalam “*The Role of NGOs in Women’s Empowerment: The Case of Tunisia*” (2015), Patrick Kilby dalam “*NGOs in India: the challenges of women’s empowerment and accountability*” (2011), Cici Anisa Fimaliza dalam “*Strategi Organisasi Perempuan Anti Trafficking Apne Aap dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia Di India*” (2015), Niteesh Kumar Upadhyay dalam “*Bride Trafficking in India: Aspects, Causes and Potential Solutions*” (2021).

Studi literatur pertama yang digunakan peneliti adalah penelitian dari **Julia Guenther**, yang berjudul “*Gender and Globalization: Power Relations at India’s Margins*” (2015). Penelitian ini digunakan penulis untuk memahami relasi kuasa dan gender. Dalam tulisannya, Guenther berpendapat bahwa relasi kuasa memainkan peran penting dalam membentuk dampak gender dari globalisasi, yang mengarah pada peningkatan marginalisasi tetapi juga perlawanan perempuan di masyarakat India. Dengan merujuk pada pemahaman Foucault tentang “kekuasaan”, Guenther menjelaskan bahwa relasi kuasa memiliki berbagai bentuk dan tingkatan, salah satunya yang disoroti di tulisan ini adalah komponen gender dalam relasi kuasa. Gender dilihat sebagai “produk” dari relasi kuasa, dimana gender dibentuk dalam serangkaian relasi kuasa tertentu. Secara menyeluruh, tulisan ini mendefinisikan gender dan relasi kuasa sebagai konstruksi sosial yang saling membentuk, berhubungan, dan menggambarkan satu sama lain. Dengan merujuk pada tulisan ini, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana praktik sosial

budaya yang terkonstruksi di kalangan masyarakat India menciptakan relasi kuasa gender dan menjadi penyebab ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan di India (Guenther, 2015).

Faseeha Saif dan Dr. Ahmad Raza dalam ***“Implications of Liberal Feminism for Pakistani Society”*** (2019), membahas bagaimana implikasi feminisme liberal di masyarakat Pakistan. Feminisme liberal didefinisikan sebagai teori feminisme yang memiliki titik sentral untuk mengupayakan kesetaraan gender dalam ranah partisipasi perempuan di agenda politiknya. Feminisme liberal juga menekankan kesamaan kemampuan manusia baik itu perempuan ataupun laki-laki untuk berpikir rasional sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan diri dan mengembangkan potensi atau kapasitas diri. Penelitian ini berusaha membantu pembaca untuk memahami bahwa di masyarakat—yang dalam konteks penelitian ini Pakistan—terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Akibat masyarakat yang patriarki, laki-laki memegang posisi kekuasaan dan mendominasi, sedangkan perempuan harus mengadopsi peran sekunder atau bahkan tidak memiliki tempat di masyarakat untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi. Selain itu, peneliti menjelaskan bahwa feminis liberal telah memiliki implikasi yang signifikan dalam masyarakat Pakistan, seperti membantu menyoroti ketidaksetaraan gender, memperjuangkan hak-hak perempuan yang setara di bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, dan memicu gerakan sosial seperti kampanye “Mera Jism Meri Marzi” - meskipun juga menghadapi kritik dan reaksi balik dari perspektif yang lebih konservatif. Secara keseluruhan, feminis liberal telah memiliki dampak sosio-politik yang signifikan di Pakistani

yang bertujuan untuk mereformasi masyarakat guna memastikan kesempatan dan perlakuan yang setara bagi perempuan. Implikasi feminisme liberal di masyarakat Pakistan sedikit banyak memiliki kemiripan dengan di India yang kaum perempuannya juga kerap mengalami diskriminasi dan kerugian akibat ketidaksetaraan gender (Saif & Raza, 2019).

Tulisan selanjutnya yang digunakan peneliti akan membantu peneliti untuk memahami pemberdayaan perempuan dan peran NGO sebagai agen pemberdayaan perempuan, yaitu penelitian dari **Hafsa Bennis**, *"The Role of NGO's in Women's Empowerment: The Case of Tunisia"* (2015). Bennis menjelaskan bahwa NGO memegang peran krusial dalam pemberdayaan perempuan, khususnya di negara yang gagal menjamin kesetaraan gender seperti Tunisia. Penelitian ini menggunakan tiga studi kasus pada tiga NGO berbeda di Tunisia. *Pertama*, CAWTAR, yaitu sebuah NGO regional yang mengimplementasikan proyek pemberdayaan ekonomi. *Kedua*, *Ligue des Electricies Tunisiennes* (LET), sebuah NGO nasional, yang bekerja untuk membangun kapasitas kepemimpinan politik perempuan melalui program pelatihan tentang komunikasi, advokasi, dan hak-hak perempuan. Dan yang *ketiga*, *Tahadi*, NGO pusat pemuda lokal, yang berfokus pada pemberdayaan budaya perempuan dan pemuda di lingkungan yang terpinggirkan. Dengan menyediakan ruang aman untuk ekspresi artistik, LSM ini membantu peserta mengembangkan kepribadian, kesadaran akan hak-hak, dan keterampilan kepemimpinan mereka. Secara keseluruhan, Bennis menyoroti bagaimana NGO di Tunisia terbukti menjadi aktor yang efisien dalam bekerja di bidang ekonomi, politik, dan budaya untuk memberdayakan perempuan dan

mempromosikan kesetaraan gender serta mengisi kesenjangan yang gagal "diisi" oleh pemerintah/negara (Bennis, 2015).

Selanjutnya, **Patrick Kilby** dalam karyanya, **"NGOs in India: the challenges of women's empowerment and accountability" (2011)** membahas pemberdayaan perempuan dalam konteks NGO India. Kilby dalam penelitiannya memaparkan sejarah dan perkembangan NGO India dalam pembangunan yang terus mengalami perubahan dan pergeseran dalam beroperasi. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran fokus NGO India kepada isu-isu marginalisasi perempuan yang dimulai sejak tahun 1980-an. Di India, perempuan menjadi kelompok yang banyak mengalami diskriminasi dan terpinggirkan atau termarginalisasi, terutama di daerah pedesaan akibat pemahaman konservatif dan kewajiban tradisional yang dipegang masyarakatnya. Sejak tahun 1980-an, NGO di India adalah bagian penting dari skema pembangunan pedesaan, kemudian selama pertengahan tahun 1980-an, program-program NGO di level atau tingkatan lokal berfokus pada peningkatan pendapatan dan sejenisnya untuk kelompok terpinggirkan dengan fokus yang meningkat pada perempuan. Setelah itu, diakhir tahun 1980-an NGO India perlahan bergerak meninggalkan program-program peningkatan pendapatan menuju pendekatan *self-help* untuk pembangunan dan menargetkan perempuan.

NGO dijelaskan sebagai organisasi kepentingan publik yang umumnya berfungsi sebagai perantara antara penyedia sumber daya seperti pemerintah atau donor lain (biasanya asing) dan *community-based organizations* (CBO) kecil atau '*grassroot*' *self-help groups* (SHG). Temuan ini membantu memperjelas peran

NGO India dalam pembangunan untuk menyediakan mekanisme penguatan masyarakat sipil yang terpinggirkan—dalam hal ini perempuan, khususnya di daerah pedesaan—melalui pendekatan pemberdayaan perempuan. Dengan merujuk pada temuan Kilby, peneliti menjelaskan bagaimana program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dapat menjadi salah satu cara bagi NGO lokal India seperti *Empower People* untuk menanggulangi isu *bride trafficking* (Kilby, 2010).

Penelitian lain terkait NGO yang dijadikan acuan oleh penulis adalah jurnal oleh **Cici Anisa Firmaliza**, yang berjudul **“Strategi Organisasi Perempuan Anti Trafficking Apne Aap dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia Di India” (2015)**. Menggunakan konsep strategi generasi NGO Korten, tulisan ini menjelaskan bagaimana *Apne Aap* sebagai NGO *anti-trafficking* lokal India membawa perubahan melalui strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan perdagangan manusia di India, dengan ruang lingkup penelitian sejak tahun 2002-2012. Tulisan ini menganalisis dan memperlihatkan keberhasilan strategi dan upaya *Apne Aap* dalam menanggulangi isu perdagangan manusia di India menggunakan tiga strategi generasi NGO Korten, yaitu generasi kedua, ketiga, dan keempat (FIRMALIZA, 2015). Perbedaan tulisan peneliti dengan temuan Firmaliza adalah, peneliti hanya akan menggunakan strategi generasi kedua NGO untuk menempatkan model pemberdayaan dan menganalisis efektivitas program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan *Empower People*.

Studi literatur terakhir yang akan melengkapi tinjauan pustaka ini adalah penelitian yang membahas permasalahan *bride trafficking* di India. Salah satu

penelitian yang dapat berkontribusi dalam pemahaman terkait *bride trafficking* di India adalah dari Niteesh Kumar Upadhyay, yang berjudul “***Bride Trafficking in India: Aspects, Causes and Potential Solutions***” (2021). Upadhyay (2021) mendefinisikan *bride trafficking* sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan kompleks yang ada dan telah diterima di kalangan masyarakat. *Bride trafficking* melanggar hak, martabat, dan kebebasan korban yang dalam hal ini adalah perempuan. Penelitian ini menekankan pentingnya mengidentifikasi aspek-aspek penyebab *bride trafficking* untuk menemukan potensi solusi atas permasalahan *bride trafficking* di India. Dalam melakukan penelitiannya, Upadhyay melakukan studi kasus dengan lima puluh perempuan dari Negara Bagian Haryana yang terletak di India Utara dan menemukan fakta bahwa perdagangan manusia dengan tujuan pernikahan telah tersebar luas di India. Selain itu, peneliti juga menguraikan bahwa praktik dan tradisi masyarakat yang bias gender dan mengabaikan kedudukan atau status perempuan di masyarakat seperti praktik *dowry* dan *female foeticide*, ditambah kondisi ekonomi yang buruk menjadi penyebab terjadinya krisis sosial yang dikenal sebagai *bride trafficking* atau perdagangan pengantin di India (Upadhyay, 2021).

Dalam membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas isu *bride trafficking* di India, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Dari penelitian terkait *bride trafficking* di India yang telah dilakukan sebelumnya, belum ada penelitian yang membahas peran NGO lokal India yang fokusnya pada pemberantasan *bride trafficking*. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait upaya-upaya pemberdayaan perempuan yang

dilakukan *Empower People* selaku NGO lokal India dalam menanggulangi isu *bride trafficking* di India melalui perspektif feminisme liberal dan pendekatan *gender mainstreaming*, serta mengklasifikasikan model program yang dilakukan *Empower People* sesuai strategi generasi NGO menurut Korten.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Feminisme Liberal

Teori feminisme melihat bagaimana Hubungan Internasional dipahami dari sudut pandang gender (Rosyidin, 2020). Gender didefinisikan sebagai konstruk sosial dan harapan-harapan kultural atau budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, gender berupaya membuat perbedaan antara keduanya, khususnya dalam penentuan atau pengasosiasian serangkaian peran, perilaku, dan sifat yang didefinisikan ‘sesuai’ untuk laki-laki dan perempuan pada suatu masyarakat (Koester, 2015). Studi gender kemudian hadir untuk menganalisis perbedaan peran yang dikonstruksi oleh suatu masyarakat melalui praktik sosial dan budayanya, serta bagaimana konstruksi gender ini membentuk sebuah hierarki kekuasaan antara laki-laki dan perempuan atau disebut sebagai relasi kuasa gender.

Relasi kuasa gender dapat dilihat dari tingkat paling intim dalam sebuah tatanan masyarakat yaitu di tingkat rumah tangga, dimana terdapat sebuah struktur yang menetapkan laki-laki tertua di keluarga sebagai pihak dengan otoritas tertinggi dimana ia memiliki ‘kuasa’ diatas anggota laki-laki lain dan perempuan di ranah domesik. Miller (2001) dan Connel (2002), mendefinisikan struktur ini sebagai struktur patriarki yang menyebabkan hadirnya ketimpangan kuasa berbasis gender

yang menempatkan perempuan menjadi pihak yang dirugikan dan termarginalisasi di suatu kelompok kolektif.

Akibatnya, relasi kuasa yang timpang ini menyebabkan pengabaian hak-hak perempuan, dan fenomena *gender inequality* pun semakin mengakar. Ketidaksetaraan tersebut tidak hanya tercermin dalam ruang publik seperti tempat kerja, pendidikan, dan politik, tetapi juga dalam ruang privat seperti keluarga dan rumah tangga, di mana perempuan sering kali dianggap sebagai warga kelas dua. Dalam konteks inilah gerakan feminisme muncul sebagai respons atas penindasan yang dialami perempuan, menawarkan dimensi normatif yang bertujuan menjelaskan operasi terhadap perempuan di masyarakat.

Pemikiran dan gerakan feminisme terus berkembang seiring berjalannya waktu, hingga kini perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi tiga gelombang dan beberapa aliran feminisme. Salah satunya adalah feminisme liberal. Asumsi dasar pemikiran feminisme liberal berorientasi pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas serta kemampuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan harusnya memiliki kebebasan dan hak yang setara dengan laki-laki. Feminisme liberal melihat operasi terhadap perempuan di masyarakat terjadi karena subordinasi perempuan sebagai masyarakat kelas dua dan tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di berbagai bidang dan ruang publik. Maka dari itu, dalam upaya menghapuskan penindasan terhadap perempuan, feminisme liberal menekankan aktivitasnya pada usaha untuk melibatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Tong, (2009) dalam bukunya yang berjudul “*Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*” menyampaikan bahwa feminisme liberal memiliki tujuan umum untuk menciptakan “masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang”; dimana dalam masyarakat yang seperti ini, baik perempuan maupun laki-laki dapat mengembangkan diri mereka. Singkatnya, feminisme liberal mengakui hak mereka (perempuan) untuk memiliki atau memainkan peran aktif dalam masyarakat dan diperlakukan dengan cara yang sama dengan laki-laki. Maka dari itu, feminisme liberal memiliki tujuan untuk membebaskan perempuan dari belenggu peran *gender* yang memberikan opresi pada perempuan dan menjustifikasi penempatan kedudukan perempuan lebih rendah—atau bahkan tidak mendapatkan tempat—dibanding laki-laki di berbagai bidang sosial (Tong, 2009).

Pemikiran feminisme liberal Mary Wollstonecraft dituangkan dalam buku yang ia tulis pada abad 18, berjudul “*A Vindication of the Rights of Woman*”. Ia menulis terkait kondisi perempuan borjuis Eropa yang kala itu kondisi sosial ekonominya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kapitalisme industri. Perempuan borjuis Eropa yang sudah menikah ini tidak memiliki pekerjaan produktif di luar rumah—karena pekerjaan sudah diambil alih oleh pihak laki-laki sebagai suami. Wollstonecraft menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi karena sisi negatif kekayaan yang membuat mereka hanya menjadi “peliharaan” suami, dimana mereka bahkan tidak diizinkan meninggalkan rumah. Mereka tidak dibiarkan mengambil keputusan sendiri dan tidak mempunyai kebebasan, sehingga pengembangan kemampuan nalarnya terhambat. Oleh karena itu, Wollstonecraft

menyangkal pernyataan bahwa perempuan secara alamiah bersifat kurang intelektual, karena sejatinya jika laki-laki diperlakukan seperti perempuan yang gerakannya dibatasi di rumah, maka laki-laki akan mengembangkan sifat yang sama pula.

Menurut Wollstonecraft, nalar adalah kapasitas yang membedakan manusia—baik perempuan maupun laki-laki—from binatang. Ia menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang sama, maka dari itu, dibutuhkan pemberian pendidikan yang adil kepada perempuan selayaknya yang diberikan kepada anak laki-laki. Kesempatan untuk mengenyam pendidikan adalah kesempatan untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moral manusia. Dengan begitu, diberikannya hak untuk mengenyam pendidikan kepada perempuan dapat menjadikan mereka sebagai “manusia yang utuh” atau *personhood*, sehingga perempuan dapat mengoptimalkan diri, menjadi mandiri, dan menentukan nasibnya sendiri.

Pemikir lain yang turut melengkapi pemikiran feminisme liberal pada abad ke-19 adalah John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill. Mill dan Taylor menegaskan bahwa terwujudnya kesetaraan perempuan dan laki-laki tidak berhenti pada pemberian pendidikan yang setara, tetapi juga kesempatan untuk mengambil peran dalam perekonomian dan memiliki jaminan terhadap hak-hak sipil, seperti, hak untuk berpendapat, berkumpul/berorganisasi, hak pilih, dan hak-hak sipil lain.

Sejalan dengan pemikiran Wollstonecraft, Mill juga menentang pernyataan bahwa ada perbedaan intelektual antara perempuan dan laki-laki. Mill

mempertanyakan superioritas laki-laki dengan menekankan bahwa laki-laki tidak lebih superior secara intelektual dibandingkan perempuan, hanya saja perempuan telah dibatasi ruang geraknya untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan laki-laki pada umumnya karena hukum atau tabu yang diarahkan kepada perempuan. Menurutnya, standar ganda etis masyarakat ini telah melukai perempuan, karena membuat perempuan terpaksa harus menjadi pribadi yang dikehendaki masyarakat alih-alih menjadi diri mereka sendiri.

Memasuki gelombang kedua feminisme pada tahun 1960-an, dibentuk sebuah gerakan hak-hak sipil perempuan yang dikenal sebagai *National Organization for Women* (NOW) di Amerika Serikat, guna menghapuskan diskriminasi berbasis gender di segala bidang kehidupan: sosial, ekonomi, dan personal. Pembentukan NOW diinisiasi oleh Betty Friedan dengan membawa agenda-agenda liberal yang memastikan kepemilikan hak yang setara antara perempuan dan laki-laki. Bersamaan dengan terbentuknya gerakan perempuan baru ini, memunculkan bentuk baru dari feminisme liberal, yaitu feminisme liberal yang melihat gerakan perempuan atau pengorganisasian perempuan dalam bentuk aksi kolektif sebagai cara untuk mencapai tujuannya (Beasley, 2005). Selain NOW yang dibentuk oleh Friedan, Eleanor Smeal yaitu seorang aktivis feminis juga membentuk sebuah organisasi yang mewakili tradisi feminis liberal, yang dikenal sebagai *Feminist Majority Foundation* (FMF). Organisasi ini mendedikasikan upayanya untuk memerangi diskriminasi gender dan untuk kesetaraan politik, sosial, dan ekonomi melalui pengorganisasian akar rumput, upaya legislatif, dan sarana hukum (Och, 2008)

Dinamika perkembangan pemikiran feminisme liberal terus berlanjut hingga gelombang ketiga feminisme. Naomi Wolf adalah salah satu pemikir feminis gelombang ketiga yang turut mengadopsi pemikiran feminisme liberal Wollstonecraft. Naomi Wolf memperkenalkan prinsip *power feminism* sebagai perpanjangan dari pemikiran Wollstonecraft, untuk mendorong perempuan untuk menyadari kekuasaan atau kekuatan yang ada dalam diri perempuan. Wolf memperkenalkan konsep *power feminism* sebagai pendekatan yang lebih memberdayakan, yang menekankan bahwa perempuan memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup mereka sendiri. Ia menolak gagasan bahwa perempuan harus terus-menerus dilihat sebagai korban yang perlu diselamatkan, dan sebaliknya, menekankan pentingnya perempuan untuk memanfaatkan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial yang ada.

Feminisme liberal berusaha menunjukkan bahwa selama ini dunia hubungan internasional adalah ranah maskulin dan didominasi laki-laki akibat relasi kuasa gender yang timpang, dan dalam sejarahnya belum adil dalam memperlakukan perempuan. Dengan melihat keberadaan relasi kuasa yang tercipta dalam masyarakat, feminisme liberal berupaya menunjukkan perlawanan terhadap penindasan perempuan melalui berbagai upaya pemberdayaan. Sejalan dengan pandangan Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan termanifestasi sebagai tindakan dalam hubungan sosial, kekuasaan harus dipahami sebagai relasi kuasa yang hadir di setiap bagian masyarakat. Namun, di mana pun kekuasaan itu ada, selalu ada resistensi (Och, 2008).

Feminisme liberal, dengan fokus pada kesetaraan hak dan kebebasan individu, memanfaatkan konsep ini untuk mengajukan perlawanan terhadap struktur-struktur patriarki yang menindas perempuan. Alih-alih merombak total sistem yang ada, feminisme liberal berfokus pada reformasi hukum dan sosial guna menciptakan ruang bagi perempuan untuk mengklaim hak-haknya. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan pendidikan, sebagai cara untuk mengurangi kesenjangan gender dan menghadapi dominasi laki-laki yang tertanam dalam relasi kuasa tersebut. Melalui pemberdayaan ini, feminisme liberal berupaya membuka akses bagi perempuan untuk mengakses sumber daya, mengubah norma-norma yang mengekang, dan mendefinisikan ulang posisi perempuan di dalam masyarakat.

1.6.2 Konsep Strategi Generasi NGO Korten (1990)

Non-Governmental Organizations (NGO) adalah salah satu aktor hubungan internasional yang bukan merupakan bagian dari pemerintah tetapi memiliki peran dalam menanggapi permasalahan baik itu secara lokal maupun internasional. Secara umum NGOs diartikan sebagai organisasi yang melakukan kegiatan sukarela yang dilakukan oleh sebuah kelompok masyarakat sipil yang terorganisir dan memiliki area fokus yang spesifik dan memiliki kemampuan dalam memobilisasi.

Strategi Generasi NGO merupakan konsep yang dikemukakan David C. Korten (1990) dalam bukunya yang berjudul *Getting to the 21st Century: Voluntary Actions and the Global Agenda*. Melalui pengalamannya bekerja dengan NGO

selama bertahun-tahun, Korten menjelaskan bahwa NGOs pada umumnya melalui proses atau fase pembangunan yang serupa dan mungkin berubah-ubah atau berevolusi seiring dengan bertambahnya pengalaman sebuah NGO. Proses atau fase NGO inilah yang kemudian ia sebut sebagai ‘generasi’. Untuk menjelaskan peran NGOs, David C. Korten membagi NGOs menjadi empat generasi, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Strategi Generasi NGO Korten (1990)

	<i>Generation</i>			
	<i>First</i>	<i>Second</i>	<i>Third</i>	<i>Fourth</i>
<i>Defining structures</i>	Relief and welfare	Small-scale self-reliant local development /Community Development	Sustainable systems development	People’s Movements
<i>Problem definition</i>	Shortages of goods and services	Local inertia	Institutional and policy constraints	Inadequate Mobilizing Vision
<i>Time frame</i>	Immediate	Project life	Indefinite long-term	Indefinite Future
<i>Spatial scope</i>	Individual or family	Neighborhood or village	Region or nation	National or Global
<i>Chief actors</i>	NGO	NGO + beneficiary organizations	All public and private institutions that define the relevant system	Loosely Defined Networks of People & Organizations
<i>NGO Role</i>	Doer	Mobilizer	Catalyst	Connector
<i>Development education</i>	Starving children	Community self-help initiatives	Failures in interdependent systems	Coalescing and Energizing Self-Managing Network

Management orientation	Logistic management	Project management	Strategic management	Spaceship Earth
-------------------------------	---------------------	--------------------	----------------------	-----------------

(Sumber: Korten, 1990)

Elaborasi lebih lanjut terhadap klasifikasi strategi generasi NGO tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi generasi pertama (*Relief and Welfare*) melibatkan NGO dalam penyediaan layanan dan bantuan langsung kepada populasi atau kelompok yang membutuhkan, seperti halnya kebutuhan akan makanan, perawatan kesehatan, atau tempat tinggal. Strategi generasi pertama merupakan strategi yang paling relevan dalam konteks bantuan darurat kemanusiaan saat terjadi bencana atau kritis, dimana terdapat prioritas utama untuk segera memenuhi kebutuhan manusia yang mendesak.
2. Strategi generasi kedua (*Small Scale, Self-Reliant Local Development*) memfokuskan peran atau kerja suatu NGO pada pengembangan kapasitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya melalui aksi-aksi lokal yang mandiri (*local self-reliance*) agar terwujud pembangunan jangka panjang.
3. Strategi generasi ketiga (*Sustainable System Development*) merupakan hasil pemeriksaan ulang dan kesadaran bahwa NGO memiliki fokus untuk memfasilitasi perubahan berkelanjutan dalam konteks kelembagaan dan kebijakan yang lebih besar, pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
4. Strategi keempat yang diidentifikasi Korten meliputi dorongan atau dukungan terhadap “*people’s movement*” (gerakan rakyat) mempromosikan visi sosial yang lebih luas. Strategi ini berfokus pada perubahan yang lebih

fundamental dan struktural dalam sistem institusional, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. NGO yang terlibat dalam strategi ini biasanya memiliki struktur yang lebih kompleks dan terlibat dalam jaringan internasional.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Relasi Kuasa Gender dan *Gender Inequality*

Feminisme liberal dalam konteks relasi kuasa gender adalah pendekatan yang berupaya mengatasi ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dengan menekankan pada kesetaraan hak dan kesempatan. Gender dipahami sebagai konstruksi sosial budaya yang menggambarkan relasi kuasa bukan sekedar gambaran perbedaan ciri-ciri fisik dan jenis kelamin (Sindle, 1995). Hal ini sejalan dengan pendapat Guenther (2015), bahwa gender dan relasi kuasa adalah konstruksi sosial yang saling menciptakan, berhubungan, dan mendekonstruksi satu sama lain. Konstruksi sosial ini kemudian melahirkan *gender inequality* atau ketidakadilan gender, yang merupakan sistem dan struktur yang didasarkan pada perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Peran gender yang opresif terhadap perempuan memanifestasi berbagai bentuk ketidakadilan, seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan perempuan, subordinasi terhadap perempuan, pelabelan tertentu pada perempuan (stereotipisasi), kekerasan, dan pemberatan beban kerja terhadap perempuan.

Di India, struktur patriarki masih sangat mengakar dalam praktik sosial budaya masyarakatnya. Praktik-praktik ini kemudian menciptakan relasi kuasa gender yang timpang dan menempatkan perempuan pada kondisi yang kurang bahkan tidak berdaya sehingga perempuan menjadi rentan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Maka dari itu, konsep relasi kuasa gender juga akan membantu menjelaskan bahwa pemberdayaan perempuan harus dilakukan bagi perempuan-perempuan India korban *bride trafficking* yang hak dan kebebasannya dirampas.

1.7.2 Gender Mainstreaming

Konsep *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender (PUG) didefinisikan sebagai strategi yang dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memajukan hak-hak perempuan dengan memasukkan analisis gender, penelitian yang peka gender, perspektif perempuan dan tujuan kesetaraan gender ke dalam setiap aksi perencanaan dan penerapan, meliputi perundang-undangan, kebijakan, program, dan institusi, di segala bidang dan level (ECOSOC, 1997). Sederhananya, *gender mainstreaming* adalah strategi yang memusatkan perhatiannya kepada perempuan melalui organisasi ataupun pembuatan kebijakan di berbagai bidang dan tingkat, baik itu internasional maupun nasional, agar perempuan dapat memperoleh kesempatan berpartisipasi dan hak yang setara dengan laki-laki.

Penggunaan perspektif feminisme liberal dalam penelitian ini secara langsung terkait dengan konsep *gender mainstreaming* karena keduanya menekankan pentingnya mengatasi ketidaksetaraan gender dalam sistem sosial. Dalam konteks ini, feminisme liberal menganggap bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan, termasuk dalam kasus *bride trafficking*, berasal dari kurangnya akses perempuan terhadap hak-hak yang sama dengan laki-laki. Untuk mengatasi ketimpangan ini, konsep *gender mainstreaming* digunakan oleh NGO seperti *Empower People* sebagai strategi utama agar kesetaraan gender menjadi bagian integral dari proses pembangunan sosial.

Melalui pendekatan ini, strategi *Empower People* tidak hanya berfokus pada penanganan korban *bride trafficking* secara langsung, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan struktural yang memungkinkan perempuan untuk lebih berdaya dan setara, serta mencegah terjadinya kembali diskriminasi yang menjadi akar masalah *bride trafficking*.

1.7.3 Strategi Generasi Kedua NGO : *Small Scale, Self-Reliant Local Development* atau *Community Development*

Strategi NGO yang ada pada generasi ini berfokus pada daya NGO dalam pembangunan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui aksi atau tindakan lokal mandiri untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Korten, 1990). Menurut Korten, sebuah NGO diklasifikasikan sebagai strategi generasi kedua NGO jika memenuhi indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Strategi Pembangunan NGO Generasi Kedua Korten (1990)

<i>Small Scale Self-Reliant Local Development/Community Development</i>	
Problem definition	local inertia
Time Frame	project life
Spatial Scope	neighborhood/village
Chief Actors	NGO + beneficiary organizations
NGO Role	Mobilizer
Development Education	community self-help initiatives
Management Orientation	Project management

Sumber: Korten (1990)

NGO yang berada pada klasifikasi strategi generasi kedua mengasumsikan bahwa *local inertia* adalah **inti dari permasalahan dalam pembangunan**. Maksudnya, dalam sebuah komunitas pedesaan, masyarakat memiliki potensi untuk perkembangan kapasitas diri tetapi tidak dapat secara aktif berkembang karena adanya inersia atau kecenderungan untuk menolak perubahan yang disebabkan oleh tradisi yang ada, isolasi, atau kurangnya pendidikan. Maka dari itu, inersia ini dapat dipatahkan melalui intervensi agen perubahan luar (NGO) yang membantu masyarakat mewujudkan potensinya melalui pendidikan, organisasi, peningkatan kesadaran, dan pengenalan teknologi sederhana. Melalui penekanan dalam **perkembangan dan pengembangan kapasitas diri** suatu masyarakat, strategi ini berfokus pada aspek **keberlanjutan** sehingga umumnya

aktivitas atau program yang dilakukan NGO pada generasi kedua bersifat **jangka panjang (*project life*)**.

Strategi generasi kedua **berfokus pada kelompok, biasanya desa atau beberapa sub-kelompok di dalamnya yang merupakan kelompok yang termarginalisasi**, seperti perempuan. Sehingga, dalam melaksanakan programnya, tidak hanya **NGO**, tetapi juga para **penerima manfaat** yaitu kelompok yang termarginalisasi menjadi **aktor utama** dalam program-programnya agar dapat mewujudkan partisipasi aktif kelompok penerima manfaat. NGO pada strategi ini lebih banyak berperan sebagai **penggerak atau mobilizer** yang membentuk, mengorganisasikan, serta memfasilitasi proyek atau program sesuai kebutuhan penerima manfaat (Korten, 1990).

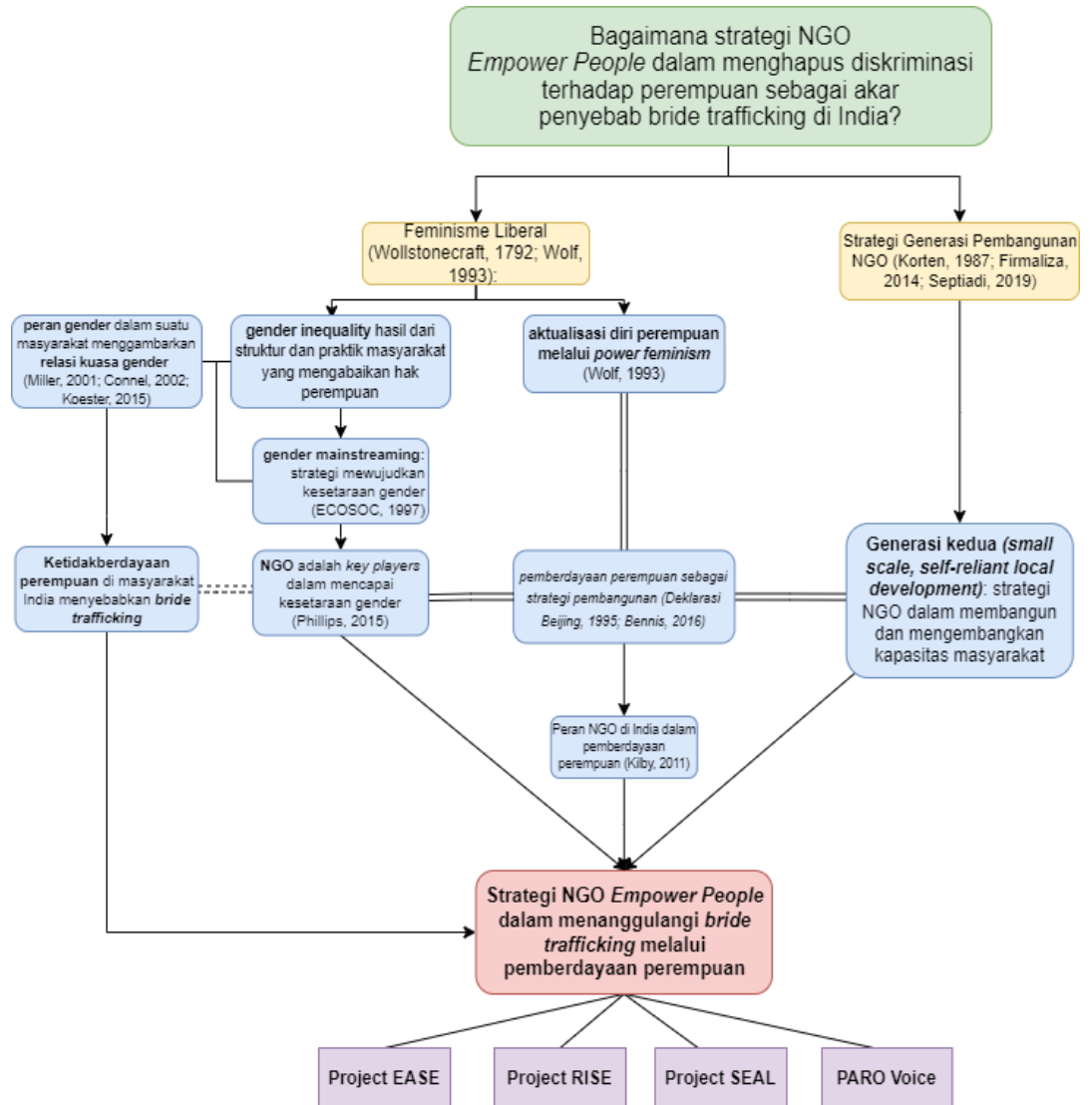
Dalam menjalankan perannya sebagai NGO, *Empower People* tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada penyintas *bride trafficking*, tetapi juga berupaya memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan advokasi hak-hak perempuan agar penyintas memperoleh kemandirian dan kekuatan untuk melawan sistem yang menindas.

Model kerja *Empower People*, yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kapasitas perempuan melalui peningkatan kesadaran hak-hak serta akses terhadap sumber daya, menjadikan organisasi ini sesuai dengan klasifikasi strategi generasi kedua NGO menurut Korten. Fokus *Empower People* pada transformasi sosial

yang lebih luas, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menunjukkan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka generasi kedua NGO, yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan memberdayakan komunitas secara berkelanjutan.

1.8 Alur Berpikir

Gambar 1. 2 Alur Berpikir



1.9 Argumen Penelitian

Argumen penelitian ini didasarkan pada analisis peran NGO *Empower People* dalam menanggulangi *bride trafficking* di India melalui pendekatan pemberdayaan perempuan. *Pertama*, ketimpangan relasi kuasa gender yang menjadi akar masalah *bride trafficking* di India tidak dapat dipisahkan dari diskriminasi struktural yang tertanam dalam praktik sosial dan budaya patriarki. Perspektif feminisme liberal dalam penelitian ini menegaskan bahwa ketidakberdayaan perempuan muncul karena ketidakseimbangan hak dan akses terhadap sumber daya, yang berusaha diatasi oleh NGO seperti *Empower People* melalui program pemberdayaan.

Kedua, strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh *Empower People* berupaya menciptakan perubahan sosial jangka panjang. Melalui konsep *power feminism*, *Empower People* mendorong perempuan untuk melihat diri mereka sebagai individu yang kuat dan berdaya, bukan sekadar korban, sementara strategi *gender mainstreaming* bertujuan mengintegrasikan perspektif ramah gender ke dalam setiap aspek program pemberdayaan untuk mencapai kesetaraan.

Terakhir, penelitian ini berargumen bahwa berdasarkan model pemberdayaan yang diterapkan, *Empower People* masuk dalam klasifikasi generasi kedua NGO menurut Korten, di mana fokus utamanya adalah pembangunan kapasitas (*capacity building*) dan transformasi sosial. *Empower People* beroperasi dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan advokasi yang memungkinkan perempuan dan komunitas lokal mengatasi masalah yang lebih mendasar dan sistemik terkait ketidaksetaraan gender.

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada umumnya didasarkan pada metode pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berusaha menafsirkan suatu peristiwa tingkah laku manusia dalam sebuah situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data dan *human instrument*.

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif-eksplanatif. Penulis berusaha memaparkan fenomena *bride trafficking* India beserta menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya di bagian rumusan masalah.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yang digunakan dalam analisis penelitian ini bertempat di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah organisasi non-pemerintah atau NGO lokal India, yakni *Empower People* India.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu melalui *library research* atau riset kepustakaan. Serta, teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan pendiri NGO *Empower People*.

1.10.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis data kualitatif, yaitu metode yang menekankan aspek pemahaman mendalam terhadap kasus atau permasalahan dalam penelitian.

1.10.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang akan diuraikan lebih lanjut pada paragraf berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat bagian latar belakang masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan diteliti penulis, perumusan masalah yang diajukan oleh penulis, tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, serta kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat metode penelitian dan jenis data yang akan penulis gunakan.

BAB II: Bab ini memuat bagian pembahasan yang berisi uraian manifestasi ketidakadilan gender di India akibat relasi kuasa yang digambarkan oleh praktik sosial budaya masyarakat India menjadi penyebab inti terjadinya *bride trafficking*. Kemudian, bab ini juga memuat respon pemerintah India terhadap isu *bride trafficking* dan kemunculan NGO *Empower People*.

BAB III: Bab ini memuat realisasi dari gerakan pemberdayaan perempuan yang dalam konteks ini berfokus pada upaya-upaya pemberantasan praktik

bride trafficking melalui program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan NGO *Empower People* di India. Kemudian, bab ini dilanjutkan dengan analisa penulis terhadap program dan strategi *Empower People* dalam memberdayakan perempuan untuk memberantas *bride trafficking* di India dengan menggunakan konsep dan teori yang disampaikan sebelumnya.

BAB IV: Bab terakhir dalam penelitian ini memuat kesimpulan penting secara menyeluruh dari tulisan ini. Sebagai bab terakhir, bab ini juga memuat cakupan kontribusi dan saran-saran yang ditujukan oleh penulis kepada penelitian selanjutnya terkait topik serupa.